

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad.S. *"Teori Kepastian Hukum dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Nasional"*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2018.
- Ali, Achmad. *"Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)"*. Kencana. Jakarta. 2009.
- Darussalam, Danny Septriadi, dkk. *"Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua"*. DDTC. Jakarta. 2025.
- Djuanda, Gustian. *"Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah"*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2011.
- Leback, Karen.. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6. Nusa Media. Bandung. 2018.
- Mardiasmo. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. CV. Andi Offset. Yogyakarta. 2019.
- Margono, H. *"Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim"*. Sinar Grafika. Jakarta. 2019.
- Mulyo, A. *"Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM Teori & Aplikasi."* Mitra Wacana Media. Jakarta. 2017.
- Pohan, Chairil Anwar. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2021.
- Purnomolastu, et al. *"Buku PPN & PPnBM"*. Ubaya Repository. Surabaya. 2025.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010.
- Tjahjo, Purnomolastu. *Buku PPN & PPnBM*. Ubaya Repository. Surabaya. 2023.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta. 2016

Jurnal

- Adelia Augie, Rr Wibsa. "Analisis Pembebasan PPN Bahan Pakan Ternak dengan Peraturan Nomor 142/PMK.010/2017 Pada PT AIM. Vol. 2 No.2. 2018.
- Badan Pangan Nasional. 2025. Memperkuat Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui Akses Protein Hewani. <https://badanpangan.go.id/blog/post/>

memperkuat-penganekaragaman-konsumsi-pangan-melalui-akses-protein-hewani

BSN.2024. Dedak Padi-Bahan Pakan Ternak (SNI 3178:2024). Bangka Belitung: Badan Standardisasi Nasional

CV ITTC Indonesia. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Palm Kernel Expller yang Berulang Pada Tahun 2021-2023. Vol. 1 No.1. 2023.

M. Ginting, Diana. "Kajian Sengketa Pajak atas Impor Bahan Untuk Pakan Ternak/Pakan Ikan Sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai". Vol.5 No.2. 2025.

Nur Ramadhana, Satria. Eka Ningsih Puji Rahayu. "Efektivitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Bahan Pakan Ternak yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan". Vol. 18 No.2. 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. PRO PATRIA

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean.

Internet

Munawaroh, Nafiatul S.H., M.H. 2024. 8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>

